



KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 620.1-1555 Jakarta, 2 – 5 – 1989
Lampiran : - Kepada
Perihal : Penggunaan Blanko Akta Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Hipotik / CV Badan Pertanahan Nasional
di –
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan sering diajukannya pertanyaan kepada kami mengenai penggunaan blangko Akta Hipotik/Creditverband yang lama, yang masih tercetak tulisan titel eksekutorial, bersama ini perlu kiranya kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Edaran kami No. 594.3/3102/Agr. Tanggal 9 September 1987 jo No.594.3/239/KBPN, Tanggal 29 Desember 1988, perihal bentuk akta dan Sertipikat Hipotik/Creditverband, dinyatakan bahwa Akta Hipotik/ Creditverband tidak perlu ada titel eksekutorialnya. Titel eksekutorial cukup tercantum pada Sertipikat Hipotik/Creditverband. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada blangko akta Hipotik/Creditverband cetakan yang baru tidak lagi dicantumkan titel eksekutorial sebagaimana tersedia saat ini.
2. Namun demikian di beberapa daerah ternyata masih terdapat blangko akta Hipotik/Creditverband cetakan lama yang masih tercantum titel eksekutorial dan dipergunakan oleh PPAT dalam membuat akta pemberian Hipotik/CV.
3. Untuk mencegah timbulnya keraguan bagi aparat di daerah dalam mendaftar dan menerbitkan sertipikat Hipotik/Creditverbandnya, maka sejak dikeluarkannya Edaran ini, blangko akta Hipotik/Creditverband cetakan lama dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya harus dipergunakan blangko akta Hipotik/CV cetakan baru, yang tidak dilengkapi dengan titel eksekutorial.
4. Apabila di suatu daerah belum tersedia blangko akta Hipotik/CV cetakan baru, maka dapat mempergunakan blangko akta Hipotik/CV cetakan lama dengan mencoret titel eksekutorialnya. Pencoretan tersebut dilakukan dan diparaf oleh PPAT yang bersangkutan.

Demikian untuk maklum dan kami minta agar Edaran ini dapat disampaikan lebih lanjut kepada para Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Saudara.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia.
3. Yth. Ketua Umum IPPAT.